

PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN TANAH ULAYAT SEBAGAI SUMBER DATA ALAM DI PROPINSI RIAU

Thamrin S

Fakultas Hukum Univeritas Islam Riau

Abstrak

Tanah ulayat adalah bagian dari hak tradisional masyarakat hukum adat, atau disebut juga dengan hak kolektif. Hak kolektif ini diperlukannya baik untuk memelihara eksistensi dan identitas kulturalnya, maupun untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan anggota masyarakat hukum adatnya, sehingga terdapat taraf kehidupan yang lebih sejahtera. Di Berbagai daerah tanah ulayat ini menjadi tunjangan kehidupan masyarakat adatnya termasuk juga di Propinsi Riau. Namun karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang membuka lahan perkebunan, sehingga tanah hutan ulayat masyarakat menjadi berkurang, dan hilang sama sekali. Akibat dari itu pemberdayaan hak-hak masyarakat adat (Tanah ulayat) yang merupakan sumber dari kehidupannya tidak bisa diberdayakan lagi.

Kata Kunci: Hukum masyarakat Adat, dan Perlindungan Hak komunalnya sebagai Sumber Daya Alamnya.

A. PENDAHULUAN

Fungsi tanah adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena dengan tanahlah manusia dapat melanjutkan kehidupannya yang lebih baik, dan setelah meninggalpun manusia memerlukan tanah, Begitulah eratnya hubungan manusia dengan tanah.

Heru Nugroho¹, menjelaskan bahwa kehidupan manusia mempunyai multidimensi, antara lain:

1. Dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia.
2. Dari sisi politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat.
3. Dari aspek kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.
4. Tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat hidup setiap orang akan kembali kepada tanah.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya tanah bagi kelangsungan kehidupan manusia dalam suatu negara. Kemudian dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut merupakan payung hukum tertinggi terhadap pengakuan hak-hak masyarakat dalam mempergunakan berbagai sumber kekayaan yang ada di bumi, seperti hutan, tanah dan sebagainya.

Di samping itu pasal tersebut di atas merupakan landasan filosofis terhadap pengaturan tanah secara yuridis dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

Paramita Iswari², Masyarakat adat yang elemen terbesar dalam struktur negara (*nation-state*) Indonesia adalah pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan terutama dalam tiga dekade terakhir ini. Kemampuan masyarakat adat untuk mengurus dan mempertahankan kelangsungan hidupnya telah dilumpuhkan, dan bahkan telah dihancurkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak adil. Penindasan yang berlangsung secara sistematis ini bahkan berlangsung atas nama pembangunan yang dilegalkan dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai fenomena yang terjadi, maka persoalan tanah akan menjadi krusial apabila pemerintah hanya sekedar memberikan pengakuan terhadap

¹ Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammdiyah University Press, Surakarta, 2001, him. 237.

² Paramita Iswari, *Dinamika Pembaruan Desa dan Agraria*, Pengalaman Belajar di Sanggau, Garut dan Toraja, Laporan Penealitian Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, him. 2.

hak-hak tradisional masyarakat adat (Tanah ulayat) melalui peraturan perundang-undangan, tetapi tidak memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap keberlangsungan terhadap tanah ulayat. Sehingga "Pemberdayaan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat Sebagai Sumber Daya Alam, terutama Di Propinsi Riau sulit untuk dapat dipertahankan, sehingga tanah ulayat sebagai asset masyarakat adat tidak dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakatnya.

B. MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN TANAH ULAYAT

1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat menurut Boedi Harsono adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan³. Dengan rumusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri dari masyarakat hukum adat, adalah sekelompok manusia yang tinggal pada wilayah tertentu, atas kewenangan masyarakat, memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi masyarakat atau sekelompok manusia dalam wilayah tersebut.

Ter Haar⁴ menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan faktor geneologis (keturunan). Pengertian masyarakat hukum adat atas faktor teritorial adalah masyarakat hukum adat yang berdasarkan atas lingkungan daerahnya. Sedangkan masyarakat hukum adat geneologis adalah masyarakat adat berdasarkan atas keturunan (keluarga).

Menurut I.G.N. Sugangga, bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis sistem kekeluargaan, antara lain:

1. Sistem *Patrilineal*, artinya masyarakat hukum adat, dimana anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui Bapak. Bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.
2. Sistem *Matrilineal*, artinya suatu sistem di mana masyarakatnya menarik garis keturunan dari pihak Ibu, ibu dari ibu terus ake atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
3. Sistem *Parental* atau *Bilateral*, artinya masyarakat hukum adat di mana

para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis Bapak dan garis

³ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2006, him. 63.

⁴ Ter Haar, Asas-asas dan susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, him. 8.

Ibu. Sehingga bila ditarik keatas dijumpai seorang laki-laki dan seorang Laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya⁵.

2. Tanah Ulayat

Pengertian Hak ulayat menurut G. Kartasapoetra dkk, adalah hak yang tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa dan suku), untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa dan suku), dimana para warga masyarakatnya (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)⁶.

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai. Dimana kepala adat mempunyai peranan dalam pemberian izin untuk memanfaatkan tanah ulayat untuk dikelola untuk mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bukan hubungan milik atau memiliki, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945. Negara dikenal dengan hak menguasai dari negara. Disini negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah tertentu.

Cornelis van Vollenhoven dalam Mahadi⁷, menjelaskan bahwa manifestasi hak ulayat adalah persekutuan hukum dan para anggotanya secara bebas boleh mengerjakan tanah yang belum dijamah orang lain untuk macam-macam keperluan. Boleh membuka tanah untuk dijadikan tanah pertanian, boleh mendirikan kampung tempat tinggal. Boleh mengambil hasil hutan. Bagi orang yang bukan orang warga persekutuan hukum yang bersangkutan boleh melakukan tindakan hanya dengan izin persekutuan. Dianggap melakukan tindak pidana apabila tidak mendapat izin, dan bisa juga orang luar persekutuan membayar sewa bumi untuk mendapat izin untuk melakukan tindakan terhadap tanah tersebut.

⁵I.G.N. Sugangga, Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, Semarang, 1998, him. 17 - 18

⁶G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, A.Setiady, Hukum Tanah Faminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta, 1985, him. 88.

⁷Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854, Alumni, Bandung, 1991, him.7.

C, METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif, dengan sumber data dari berbagai peraturan perundangan-undangan, teori-teori para ahli dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan objek kajian.

D. KERANGKATEORI

1. Teori Negara Hukum

Pengertian tentang “Negara hukum”, dari berbagai perpustakaan, antara lain⁸ Wiryo Projodikoro, memberikan pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Muhammad Yamin, mendefinisikan bahwa negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas “*the laws and not men shall govern*”. Joenianto memberikan pengertian negara hukum sebagai negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Sementara Sudargo Gautama, menyatakan bahwa paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum. Soediman Kartohadiprodjo, mendefinisikan negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.

Dari berbagai definisi dari para ahli hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai negara hukum, maka penguasa harus tunduk kepada hukum sebagai esensi negara hukum. UUD 1945 secara tegas menyebutkan dalam penjelasannya bahwa negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*).

Ciri-ciri negara hukum (*rechstaat*)⁹ antara lain:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuat

* Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung: 2012, him. 1.

⁹ Ibid, him. 6

undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, kekuasaan ini tidak hanya menangani sengketa antar individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dengan penguasa dan pemerintah berdasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).

Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut "*vrijheidrechten van burger*".

Indonesia sebagai negara hukum (*veschtstaat*) berdasarkan Pancasila, berarti setiap tindakan Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenang negara harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pasal 1 Ayat (3) Amandemen undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Menurut Roscoe Pound konsep negara hukum *rule of law* berintikan yudicial artinya selalu menjunjung tinggi lembaga peradilan (*supremacy law*), baik rakyat maupun pemerintah, jika melakukan kesalahan harus menyelesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perlakuan antara rakyat maupun pemerintah dimata hukum (*equality before the law*). Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yaitu hanya bertugas sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat¹⁰.

Paul Scholten menyebutkan ada dua ciri negara hukum, yaitu ciri utama negara hukum ialah "*er is recht tegenover den staat*", artinya warga negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat, asas ini sebenarnya meliputi dua segi, pertama manusia itu mempunyai suasana tersendiri yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara, kedua pembatasan suasana manusia itu, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, sehingga negara hukum berbunyi "*er is scheiding van machten*", artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan¹¹.

Bebagai rumusan negara hukum tersebut di atas, maka berarti tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak

¹⁰ Ibid,

¹¹ Ibid,

tertulis. Hal tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3) Amandemen UUD 1945, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menjelaskan bahwa hukum alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang melindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum¹². Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon, sebagai mana dikutip Bahder Djohan Nasution, dapat dibagi menjadi dua ma- cam¹³, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Dengan perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dengan mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif, artinya perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Sudikno Mertokusumo¹⁴, menjelaskan bahwa, dalam fungsinya hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatatan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat. Membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 266.

¹³Op. Cit, him. 258-259.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, 269.

3. Teori Keadilan

Keadilan selalu dijadikan sebuah nilai ideal dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum, meskipun sebagai konsep yang abstrak keadilan seringkali dipahami tanpa batasan yang jelas. Perkembangan pemikiran hukum Islam pun tidak dapat dilepaskan dari konsepsi keadilan.

Munir Fuady¹⁵ menjelaskan, bahwa keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil, sedangkan dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan istilah *justice* yang memiliki persamaan arti dengan *justicia* yang memiliki arti "jujur" (*honest*), benar menurut hukum (*legally right*), patut (*propen*), pantas (*fair*), atau layak (*righteous*).

Kata *justice* dalam banyak hal disamakan dengan "*equity*" atau "*equitas*" yang berarti keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai, 1) kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), jujur (*honesty*), 2) tidak memihak (*impartiality*) representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta, 3) retribusi atas balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan, 4) alasan yang logis (*sound reason*), kebenaran (*rightfulness*), 5) adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfully*)¹⁶.

Semua orang dalam suatu negara selalu menginginkan hidup dalam keadilan dan persamaan hak dengan berpedoman pada peri kemanusiaan. Dengan demikian segala aspek kehidupan masyarakat harus ditata dengan adil mungkin. Undang-undang yang ada adalah sarana penataan semua warga negara Indonesia, dengan demikian haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi norma keadilan. Termasuk dalam hal pelaksanaan hidup bernegara bagi para pemimpin bangsa.

Pemikiran filosofis Presiden Soekarno¹⁷ menegaskan dalam sebuah pidato kuliah umum tentang "Pancasila", di istana negara menjelaskan bahwa, keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan dan tidak ada penghisapan.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan

¹⁵ Anwar Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Chaiia Indonesia, Jakarta, 2007, him. 90.

¹⁶ Ibid, Anwar Fuady, 90 - 91.

¹⁷ [http://www.academiiia.edu/5210600/Pengertian Keadilan Sosial](http://www.academiiia.edu/5210600/Pengertian%20Keadilan%20Sosial), diakses tanggal 18 Desember 2014.

yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial berarti keadilan merupakan milik setiap individu yang ada di masyarakat. Keadilan sosial yaitu adil yang menyeluruh yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada diskriminasi atau merugikan satu diantara banyak pihak yang terlibat. Serta tidak melibatkan status sosial, agama, ras, adat, warna kulit ataupun keanekaragaman yang ada di Indonesia yang artinya hitam tetap hitam putih tetap putih, benar tetap benar dan salah tetap salah.

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu¹⁸: keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan keadilan komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum dalam masyarakat bagi segala warga negara dan penduduk. Keadilan sosial di bidang kemasyarakatan menjadi suatu segi dari perikeadilan yang bersama-sama dengan perikemanusiaan ditentang dan dilanggar oleh penjajah yang harus dilenyapkan, seperti dirumuskan dalam Pembukaan alinea I. Demokrasi politik berhubungan dengan keadilan sosial memberi hak yang sama kepada segala warga dalam hukum dan susunan masyarakat negara, seperti dirumuskan dalam pasal 27 dan 31 UUD 1945.

- a. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan,
- b. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan,
- c. Hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, d.

Mendapat pengajaran

Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Selain itu dalam realisasinya Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan negara, sehingga Pembangunan Nasional harus senantiasa meletakkan asas keadilan sebagai dasar negara. .

¹⁸ <http://komunitasbatas.wordpress.com/2012/12/19/keadilan-sosial-adalah-2/>. diakses tanggal 21 Maret 2015

Karena itu sangat terang bahwa kita harus meniadakan segala bentuk kepincangan sosial dan kepincangan pembagian kekayaan nasional kita. Kepincangan-kepincangan demikian bukan saja tidak menjamin terwujudnya keadilan sosial, malahan merupakan penghambat dari kesetiakawanan yang menjadi kekuatan penting dalam usaha kita untuk sama-sama memikul beban pembangunan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Pengertian keadilan sosial memang jauh lebih luas daripada keadilan hukum. Keadilan sosial¹⁹ bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak warganegara dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini terkandung pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat, dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warganegaranya adalah pemerintah yang gagal dan karena itu tidak adil.

Hukum adalah sebagai pengemban nilai keadilan, oleh karena itu menurut Radbruch yang menjadi ukuran adil tidak adiknya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif adalah, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum²⁰.

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan sejarah, bahwa eksistensi tanah ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat, sudah ada jauh sebelum lahirnya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), apapun yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara

¹⁹http://id.wikipedia.org/wiki/keadilan_sosial. diakses 21 Maret 2015.

²⁰Satjipto Rahardjo, (Radbruch), Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 112.

harus dipayungi oleh landasan hukum yang kuat. Tidak terkecuali juga tentang tanah ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Di Propinsi Riau, berdasarkan sejarah dengan adanya kerjaan-kerjaan pada prinsipnya seluruh kawasan di Daerah Riau seluruh hutan tanahnya telah dikuasai oleh persekutuan-persekutuan, dimana kepala suku serta badan musyawarahnya telah mengatur pemanfaatan kekayaan dan benda-benda yang berada dalam kawasan hutan tanah ulayat mereka. Tidaklah beralasan kiranya jika hutan tanah ulayat di daerah Riau hendak dikualifikasikan sebagai hutan tanah negara bebas. Seluruh hutan tanah ulayat di Daerah Riau ada pemiliknya dan telah diakui oleh pemerintahan-pemerintahan terdahulu. Pemerintah Sultan dan Raja-raja masa lalu. Sangat tidak adil rasanya kiranya hak asal usul masyarakat hukum adat tersebut mau dirampas begitu saja tanpa diajak berunding pihak masyarakat hukum adat²¹.

Wan Ghalib²² pada prinsipnya seluruh kawasan di Daerah Riau, seluruh hutan tanah ulayatnya dikuasai oleh persekutuan-persekutuan, dimana kepala suku dan tolon musyawarahnya mengatur pemanfaatan kekayaan dan benda- benda yang terdapat dalam kawasan hutan tanah ulayat mereka.

Salah satu hak komunitas masyarakat hukum adat adalah memiliki kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. Seperti tanah hutan ulayat. Tanah hutan ulayat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat di Propinsi Riau, sebagai sumber kehidupan anggota masyarakatnya, seperti damar, rotan, ikan, madu lebah (Sialang) dan lain sebagainya. Hutan tanah ulayat yang semula dapat mensejahterakan masyarakat adatnya, akhirnya menjadi pudar dengan berkuasanya Orde baru pada pemerintahan rezim Soeharto selama 32 tahun. Dengan berbagai cara yang diatur secara sistematis, baik pembentukan peraturan perundang- undangan yang dianggap dasar legalitas yang melemahkan status tanah ulayat. Karena masyarakat adat berada pada posisi yang lemah baik ekonomi maupun fisik, akhirnya tanah ulayat masyarakat adat jatuh juga kepada perusahaan-perusahaan yang kemampuan ekonominya lebih baik dari masyarakat adat. Karena terjadi penekanan dan intimidasi terhadap

²¹ Azaly Djohan, Tanah ulayat dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, LPNU Press, Pekanbaru, 2005, him 223.

²² Ibid, Wan (Shalib, 224.

masyarakat adat yang berusaha untuk mempertahankan tanah ulayat sebagai sumber kehidupannya.

Dengan mendapatkan kekuatan hukum, seperti izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan besar untuk dijadikan lahan perkebunan sawit, dan perusahaan kertas. Sehingga hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh Hukum Adat menjadi tidak berarti. Pemberdayaan Hukum Masyarakat Adat untuk pengelolaan Sumber Daya Alamnya, sekarang hanya menjadi mimpi.

Pernyataan dalam Pidato Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudoyono, pada acara peringatan hari Internasional masyarakat adat sedunia menyatakan, bahwa masyarakat hukum adat, sering berada pada posisi yang lemah, dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka, di tengah- tengah kekuatan modal dalam mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam. Pemerintah tentu harus berpihak kepada kelompok yang lemah, seraya mencari jalan keluar secara proposional dan adil, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara tanpa harus mengorbankan hak masyarakat hukum adat. Karena itu saya menyeryukan kepada segenap jajaran Pemerintah di Pusat maupun di Daerah, agar sungguh-sungguh dalam memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di daerah-daerah, dalam menyusun program pembangunan²³.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hutan tanah ulayat sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sesuai dengan panggilan jiwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat merupakan hak komunal (hak bersama) yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adatnya, seperti di dalam hutan terdapat damar, buah-buahan, rotan, ikan dan kepungan sialang yang menghasilkan madu lebah dan kekayaan alam lainnya.

²³ Presiden RI Soesilo Bambang Yudoyono, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, him. 87

2. Rekomendasi

Harapan kepada Pemerintah terhadap persoalan masyarakat hukum adat, serta hak-hak masyarakat adat (tanah ulayat) adalah memberikan perlindungan hukum dengan membentuk regulasi tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat (tanah ulayat). Dengan demikian lebih lanjut pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sehingga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lebih memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Baku

- Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammdiyah University Press, Surakarta, 2001.
- Paramita Iswari, *Dinamika Pembaruan Desa dan Agraria, Pengalaman Belajar di Sanggau, Garut dan Toraja*, Laporan Penealitian Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2006,
- Ter Haar, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang, 1998 G.
- Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, A.Setiady, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985,
- Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Alumni, Bandung, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1988, him. 269.
- Presiden RI Soesilo Bambang Yudoyono, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2007,
- Azaly Djohan, *Tanah ulayat dan keberadaan Masyarakat-Hukum Adat*, LPNU Press, Pekanbaru, 2005.

internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/keadilanSosial>, diakses 21 Maret 2015.

<http://komunitasbatas.wordpress.com/20112/12/19/keadilan-sosial-adalah-2/>,
diakses tanggal 21 Maret 2015.

<http://www.academiiia.edu/5210600/Pengertian> Keadilan Sosial, diakses
tanggal 21 Maret 2015

<http://komunitasbatas.wordpress.com/20112/12/19/keadilan-sosial-adalah-2/>,
diakses tanggal 21 Maret 2015